

**UPAYA HAKIM MENDAMAIKAN PERCERAIAN TERKAIT
PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WAWAN SUGIANTO

NIM: 01351139

PEMBIMBING

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

2. Dra. Hj. ERMISUHASTI S, MSI.

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, ada yang diakhiri dengan perdamaian para pihak (suami-isteri), tetapi juga banyak perkara perceraian yang berakhir dengan putusan mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian. Fakta atas beberapa perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian dan perceraian pada tahun 2005 menarik untuk diteliti, yaitu mengenai upaya hakim dalam mendamaikan perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan hakim dalam melakukan upaya perdamaian. Skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dan normatif digunakan untuk memahami sekaligus mengkritisi upaya hakim dalam mendamaikan perceraian serta menganalisis keberhasilan dan kegagalan upaya perdamaian dalam perkara perceraian dengan melihat ketentuan hukum normatif maupun yuridis. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim dan suami isteri yang melakukan perceraian serta dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh dan membahas secara mendalam upaya hakim dalam mendamaikan perceraian serta penyebab kegagalan dan keberhasilan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.

. Upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas belaka untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh hukum, terlebih tatkala suami isteri sudah lama membina rumah tangga dan sudah mempunyai keturunan. Upaya perdamaian juga dilakukan oleh hakim pada sidang-sidang berikutnya dan memerintahkan kepada suami isteri agar hidup rukun kembali pada setiap akhir sidang. Dalam hal suami atau isteri diwakili oleh kuasa hukum maka hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menghadirkan kedua pihak menghadap sendiri di persidangan.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan hakim dalam melakukan upaya perdamaian, yaitu terkait dengan hadir tidaknya suami isteri dalam persidangan, rumit atau kompleks tidaknya alasan perceraian yang diajukan, dan sulit tidaknya suami isteri dinasehati dalam persidangan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wawan Sugianto

NIM : 01351139

Judul Skripsi : Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Desember 2008

11 Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wawan Sugianto

NIM : 01351139

Judul Skripsi : Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Desember 2008

11 Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, MSI.
NIP. 150 240 578



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/104/2009

Skripsi dengan judul:

**UPAYA HAKIM MENDAMAIKAN PERCERAIAN TERKAIT
PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wawan Sugianto
NIM : 01351139
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 6 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II

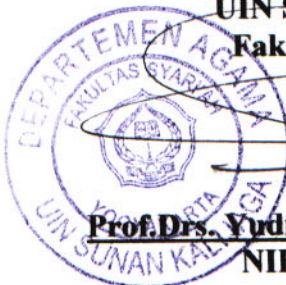
Drs. Slamet Khilmi, MSI.
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 28 Februari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fatha	a	a
_____	Kasroh	i	i
_____	Damma	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 سنل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: الجنة روضة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نعم	- nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ ال ”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل	- al-Rajulu	القوم	- al-qaumu
السيدة	- al-Sayyidatu	الولي	- al-waliyyu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
نوء	- nau'un	تأخذون	- ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

- وإن الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn
والميزان الكيل وفوا فأ - Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mīzān

9. Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وما محمد الا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl
ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: UPAYA HAKIM MENDAMAIKAN PERCERAIAN TERKAIT PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005.

Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sewajarnya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, MSI., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, MSI., selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ibunda tercinta Istianah, Kakakku Nursianah serta Adikku Desi Nursita Sari yang telah membantu dan memberikan motivasi berarti yang tiada henti-hentinya dan do'anya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buat calon istriku, diajeng Sukastini, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi terbesar yang tak ternilai pengorbanannya, dan do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan alumni MAKN Jember angkatan 2001 di Surabaya yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat, harta, tenaga dan waktunya, serta teman-teman seprofesi, di Yogyakarta.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 28 Dzul qoidah 1429 H
27 November 2008 M

Penyusun

Wawan Sugianto
NIM 01351139

MOTTO

“ Hidup Adalah Perjuangan “

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untukmu Ayah dan Ibu tercinta,
Serta keluarga besar
Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA	
A. Perceraian.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
2. Alasan Perceraian.....	24
3. Akibat Hukum Perceraian	31
B. Proses Beracara di Peradilan.....	34
1. Pengajuan Gugatan dan Permohonan.....	34
2. Pemeriksaan Perkara	37

BAB III. PERKARA PERCERAIAN DAN PERDAMAIAAN

DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005

A. Perkara Perceraian dan Perdamaian	40
B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian	48

BAB IV. ANALISIS TERHADAP UPAYA HAKIM MENDAMAIKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005

A. Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian.....	58
B. Faktor - faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Upaya Perdamaian	70
1. Faktor – faktor Penyebab Keberhasilan	70
2. Faktor – faktor Penyebab Kegagalan	72

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 : Daftar Terjemahan.....</i>	I
<i>Lampiran 2 : Biografi Tokoh dan Ulama'</i>	IV
<i>Lampiran 3 : Pedoman Wawancara</i>	VI
<i>Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dan Izin Riset</i>	
<i>Lampiran 5 : Penetapan Pencabutan Perkara</i>	
<i>Lampiran 6 : Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keteraturan dan ketertiban tatanan kehidupan manusia, termasuk persoalan mengenai perkawinan. Perkawinan dimaksudkan menjadi wadah penyalur hasrat naluriah dengan dibingkai aturan agama sehingga manusia dapat menempati posisi yang terhormat. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan sosial yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bermoral. Eksistensi keluarga yang baik dan kokoh akan membentuk tatanan kehidupan sosial yang baik dan kokoh pula, begitu juga sebaliknya kehidupan keluarga yang buruk dan lemah juga akan mengakibatkan terbentuknya tatanan kehidupan sosial yang buruk dan lemah. Dengan demikian, keluarga merupakan pondasi penting dalam membangun kehidupan sosial, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang Perkawinan) diperoleh pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

Keluarga bahagia akan terbentuk apabila tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga itu berjalan dengan tenang (*smooth*) tanpa goncangan yang berarti (*free from quarreling*).⁵ Akan tetapi, dalam perjalanan mengarungi kehidupan keluarga seringkali suami istri menemui berbagai masalah yang menyebabkan goncangan maupun ketidakharmonisan dalam keluarga. Keadaan demikian tentu menuntut suami

² Pasal 1.

³ Pasal 2 dan 3.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 12.

istri harus benar-benar mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, dengan memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga sesuai dengan ketentuan hukum normatif maupun hukum positif. Apabila suami istri tidak mampu menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan kegagalan dalam mencapai tujuan keluarga, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya perceraian.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab Islam menginginkan pencapaian keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, serta perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat (*misaqan galida*). Perceraian dipahami sebagai alternatif terakhir apabila cara lain tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Dengan demikian, apabila dalam sebuah keluarga ada permasalahan hendaknya diselesaikan secara damai, bukan harus diselesaikan lewat perceraian. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

أبغض الحلال الى الله الطلاق⁶

Undang-undang Perkawinan memakai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus didasarkan atas alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), III: 255.

Dalam proses persidangan, hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. 154 Rbg, hakim harus berusaha mendamaikan para pihak.⁷ Aturan kewajiban mendamaikan para pihak dilakukan minimal pada sidang pertama ini berlaku dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta yang diakhiri dengan perdamaian para pihak⁸, tetapi juga banyak perkara perceraian yang berakhir dengan adanya putusan yang mengabulkan gugatan atau permohonan cerai. Fakta atas beberapa perkara perceraian, yang berakhir dengan perceraian atau perdamaian pada tahun 2005 menarik untuk diteliti mengenai upaya hakim dalam mendamaikan perceraian. Alasan penyusun meneliti perkara perceraian dan perdamaian pada tahun 2005 karena didasarkan pada kuantitas perkara perceraian yang berhasil didamaikan serta terkait dengan kelengkapan data yang sudah dihimpun.

Perlu dimengerti, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam di daerah Kota Yogyakarta, yang mana masyarakat Kota Yogyakarta dinilai mempunyai pola pikir yang *relatif kritis dan modern* dalam memahami persoalan. Jika ini dikaitkan dengan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 105.

⁸ Maksud *Para Pihak* adalah suami isteri yang terlibat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

perkawinan dan perceraian, maka sepatutnya mereka mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai arti penting dari perkawinan dan perceraian dimaknai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah keluarga. Tatkala anggota masyarakat melakukan perceraian tentunya mereka sudah mempertimbangkan alasan dan akibat hukum perceraian. Selanjutnya, keberadaan *paradigma* masyarakat Kota Yogyakarta yang kritis dan modern yang didukung pendidikan, pergaulan hidup dan akses informasi diharapkan juga berpengaruh pada pemahaman mereka mengenai arti penting perdamaian, khususnya dalam perkara perceraian. Dengan demikian upaya hakim melakukan perdamaian dapat dilakukan secara maksimal dan kemungkinan berhasil menjadi lebih besar.

Fakta mengenai keberhasilan dan kegagalan hakim dalam mendamaikan perceraian juga menjadi persoalan yang relevan untuk dibahas, mengingat hal tersebut terkait dengan upaya hakim mendamaikan perceraian. Perlu dimengerti juga, bahwa hakim mempunyai peranan penting dalam proses peradilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan atas perkara yang diajukan di pengadilan.

B. Pokok Masalah

Berdasar uraian yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, terdapat dua pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya hakim mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?

- b. Apa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan hakim mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan upaya hakim mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005.

2. Kegunaan

- a. Secara praktis, penelitian ini nanti diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta agar lebih memaksimalkan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.
- b. Secara ilmiah, penelitian ini nanti diharapkan mampu menambah upaya pengembangan pemikiran hukum Islam bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas terutama terkait dengan pentingnya upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas secara mendalam upaya hakim mendamaikan para pihak terkait asas mempersukar terjadinya perceraian dalam perkara perceraian. Akan tetapi,

penyusun tidak menafikan ada beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penyusun lakukan, baik dari skripsi maupun buku mengenai upaya perdamaian dan perceraian. Skripsi Kasnudin, “Kedudukan Akte Perdamaian dalam Putusan PA Yogyakarta tentang Perceraian.” Skripsi ini membahas mengenai kedudukan dari akte perdamaian (*acte van vergelijk*) dalam perkara perceraian serta konsekuensi yuridis dari akta perdamaian tersebut. Perlu dipahami bahwa akta perdamaian yang kemudian mensyaratkan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu kemudian terjadi pelanggaran maka akad perdamaian tidak dapat dieksekusi untuk mengakibatkan putusnya perkawinan, apabila salah satu pihak menghendaki perceraian, maka harus diajukan perkara perceraian baru dengan alasan yang berbeda.⁹

Skripsi Muhammad Nur, “Pengabaian Hak Istri sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997”. Skripsi ini membahas tentang alasan Pengadilan Agama menjadikan pengabaian hak istri sebagai alasan perceraian dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara tersebut. Hasilnya adalah alasan yang digunakan adalah karena hak dan kewajiban suami istri adalah faktor-faktor yang sangat penting dan menentukan dalam kelangsungan hidup berumah tangga suami istri. Adapun pertimbangan hukum yang dipakai bahwa pengabaian hak istri adalah merupakan pelanggaran taklik talak yang

⁹ Kasnudin, “Kedudukan Akte Perdamaian dalam Putusan PA Yogyakarta tentang Perceraian,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

merupakan janji perkawinan dan majelis hakim berpedoman pada ketentuan hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku *fiqh*.¹⁰ Dalam skripsi tersebut diketahui bahwa upaya hakim mendamaikan para pihak sudah dilakukan tetapi tidak berhasil sehingga perkara perceraian pun berakhir dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat.

Skripsi Asna Farida, "Cerai Gugat karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)". Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya dan penyelesaian perkara tersebut. Dalam skripsi tersebut terdapat penjelasan bahwa sebenarnya hakim sudah mengupayakan para pihak untuk damai tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, dijelaskan dalam skripsi tersebut bahwa penyebab tidak terpenuhi kewajiban suami dikarenakan suami meninggalkan istri yang pada awalnya izin untuk bekerja tetapi pada kenyataannya suami tidak mengirimkan uang untuk anak dan istrinya, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, suami berbuat serong, suami adalah penjudi dan suami mempunyai penyakit yang susah disembuhkan sehingga suami tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya.¹¹

¹⁰ Muhammad Nur, "Pengabaian Hak Isteri sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹¹ Asna Farida, "Cerai Gugat karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Skripsi Amalia Rahmawati, dengan judul “Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002)”.¹²

Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam mencegah cerai, hakim berusaha mendamaikan para pihak. Faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan para pihak adalah para pihak sudah bulat bercerai, karena keterbatasan waktu, dan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dibanding dengan maslahat.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Halim, dengan judul “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”.¹³ Menjelaskan penerapan mediasi di pengadilan agama (PA) Yogyakarta belum optimal karena mengalami hambatan baik masalah teknis maupun non teknis. Adapun hambatan faktor teknis, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan mekanisme yang tidak praktis. Hambatan faktor non teknis, yaitu kemauan bulat para pihak untuk bercerai, karakteristik perkara lebih bersifat perasaan sehingga dipandang kurang sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara, dan perbedaan penafsiran terhadap Perma No. 2 tahun 2003.

Dalam skripsi yang disusun oleh Nurul Aeni, dengan judul “Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan

¹² Amalia Rahmawati, “Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹³ Abdul Halim, “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Agama Purbalingga Tahun 2005)”,¹⁴ menjelaskan bahwa hakim sudah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi keberhasilannya masih minim. Faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan para pihak adalah para pihak sudah bulat bercerai, karena keterbatasan waktu, kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dibanding dengan maslahat, dan belum diterapkannya lembaga mediasi sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dengan diadakannya lembaga mediasi.

Dalam skripsi yang disusun oleh Firdaus Ainur Rafiq dengan judul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”.¹⁵ Didalamnya menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah menerapkan lembaga mediasi. Akan tetapi peran lembaga ini masih belum efektif dalam mengurangi tingkat perceraian. Kendala yang dihadapi karena para pihak sudah bulat bercerai, para pihak tidak menyambut baik terhadap adanya lembaga ini, pengingkaran terhadap kesepakatan dan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir.

Dalam buku yang ditulis oleh A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,¹⁶ dijelaskan bahwa dalam sengketa yang berkaitan

¹⁴ Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁵ Firdaus Ainur Rafiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 93-94.

dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaan ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama), hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali kalau salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila kedua belah pihak berkediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Dalam perkara perceraian (terutama jika sudah ada anak) maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya mendamaikan suami istri tersebut.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan dalam setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata. Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan beberapa uraian diatas belum ada yang khusus mengkaji dan mengkritisi upaya hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di luar sidang terlepas dari tugas yang dikuasakan kepada mereka. Penyusun menginginkan agar hakim lebih berperan aktif di luar siding terlepas dari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hakim pada sebuah pengadilan.

E. Kerangka Teoretik

Konstruksi pemikiran yang penyusun bangun dalam penelitian ini nanti adalah melandaskan pada landasan hukum mengenai pokok bahasan perceraian dan upaya mendamaikan para pihak.

Perkawinan merupakan sebuah proses pertukaran hak dan kewajiban antara suami isteri, sebab perkawinan merupakan penyatuan dua individu yang berbeda, proses ini harus selalu dirundingkan dan dinegosiasikan. Adapun perceraian terjadi karena suami isteri tidak dapat menegosiasikan hak dan kewajiban. Terkait perceraian, dijelaskan bahwa perceraian merupakan suatu jalan terakhir tatkala suatu kehidupan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berbagai cara sudah ditempuh untuk mempertahankan eksistensi kehidupan keluarga. Terdapat beberapa hadis yang terkait dengan perceraian, yaitu sebagai berikut:

ابغض الحلال الى الله الطلاق¹⁷

Hadis ini menjelaskan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal tetapi tidak disukai oleh Allah. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami isteri yang sudah tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, maka sebagai jalan terakhir mereka melakukan perceraian.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْتُهُ الْجَنَّةَ¹⁸

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), III: 254, hadis nomor 2178, "Bab Karahiyyah at-Talaq". Hadis dari Kasir bin Ubaid dari Ibnu Umar.

¹⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I : 662, "Kitab al-Talaq", bab Karahiyyah al-Khul' li al-Mar'ah, hadis nomor 2055.

Hadis ini menjelaskan bahwa perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan, akan tetapi perceraian tersebut harus mempunyai alasan. Isteri tidak boleh seenaknya sendiri minta cerai kepada suaminya dengan alasan sudah bosan hidup dengan suami atau isteri sudah tidak suka lagi dengan suaminya. Isteri yang memintai cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan benar maka hal itu tidak diperbolehkan bahkan diharamkan baginya bau surga.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-undang Perkawinan, diperoleh keterangan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka dianut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dipertegas oleh Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Alasan perceraian tersebut di atas terdapat penambahan dalam Pasal 116 KHI yaitu karena melanggar taklik talak dan peralihaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

¹⁹ Perlu dipahami bahwa ketentuan-ketentuan yang penyusun kemukakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tetap berlaku karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *jo.* PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim harus benar-benar memperhatikan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Di antara sumber hukum acara perdata adalah HIR dan Rbg. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, maka hakim harus berusaha mendamaikan para pihak. Ketentuan ini tentu juga berlaku di Pengadilan Agama.

Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Anjuran upaya perdamaian dalam al-Qur'an juga dikemukakan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله

بينهما إن الله كان عليماً خبيراً²²

Untuk memahami tindakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, perlu diketahui tugas hakim sebagai berikut:

²¹ Alasan karena murtad tersebut jika dipahami secara *a contrario* dapat diperoleh pemahaman bahwa murtad yang tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam keluarga tidak dapat menjadi alasan perceraian.

²² Al-Nisa' (4): 35.

1. Mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
2. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.²³

Dalam hukum acara tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang bagaimana tata cara perdamaian yang harus dilakukan oleh hakim. Dalam hal ini perlu untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam upaya perdamaian, yaitu dengan cara melihat mekanisme penyelesaian sengketa secara damai atau yang dikenal dengan *alternative dispute resolution* (ADR). ADR terbagi menjadi tiga macam yaitu negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dari tiga bentuk ADR tersebut selalu ada usaha untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Mekanisme ADR mulai dimanfaatkan dalam prosedur pengadilan yang disebut dengan *Court annexed* ADR. Hal ini disebabkan hakim wajib mengusahakan perdamaian diantara mereka yang sedang berselisih, akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa hakim kurang bersungguh-sungguh

²³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

dalam mengusahakan perdamaian. Pada prakteknya, hakim hanya sering menunda sidang agar mereka berinisiatif sendiri didalam mencari solusi pada permasalahan yang sedang mereka hadapi tanpa ada campur tangan hakim diluar sidang sebagai penengah dan memberikan solusi agar mereka dapat berdamai kembali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data primernya didapat melalui hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai upaya hakim dalam mendamaikan para pihak sesuai dengan asas mempersukar terjadinya perceraian dilanjutkan dengan analisis terhadap hal tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka data primer diperoleh melalui wawancara dengan para hakim dan para pihak yang berperkara serta dokumentasi terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang mendukung atau memperjelas data primer.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim dan suami isteri yang melakukan perceraian serta dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

c. Observasi

Yaitu cara memperoleh data dengan mengamati dan mendengar jalannya proses persidangan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan bukti, terhadap usaha hakim PA Yogyakarta dalam mendamaikan perkara perceraian dengan mengikuti secara langsung jalannya persidangan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nanti adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dan normatif digunakan untuk memahami sekaligus mengkritisi upaya hakim dalam mendamaikan perceraian serta menganalisis kegagalan dan keberhasilan upaya perdamaian dalam perkara perceraian dengan melihat ketentuan hukum normatif maupun yuridis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Kemudian setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai usaha hakim mendamaikan perkara perceraian kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian dengan alasan atau faktor yang bermacam-macam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perceraian dan proses beracara di Pengadilan Agama. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang perceraian, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, alasan perceraian dan akibat hukum. Sub bab kedua berbicara tentang proses beracara di Pengadilan Agama,

yang meliputi: pengajuan gugatan dan tahap pemeriksaan perkara, berisi tentang: pembacaan gugatan/permohonan, perdamaian, jawaban tergugat/termohon, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan.

Bab ketiga, membahas mengenai perkara perceraian dan perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005. Bab ini terdiri dua sub bab, yaitu: perkara perceraian dan perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan faktor-faktor penyebab perceraian.

Bab keempat, membahas analisis terhadap upaya hakim mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005. Bab ini diharapkan mampu menjawab pokok masalah dengan mendasarkan pada kerangka teoretik yang penyusun kemukakan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: upaya hakim mendamaikan perceraian, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan upaya perdamaian.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penyusun uraikan mengenai upaya hakim mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama dalam kurun waktu tahun 2005, praktek usaha hakim mendamaikan yang ada di PA Yogyakarta masih terdapat kekurangan dan kekurangannya justru pada bagian penting dari usaha mendamaikan. Hakim tidak menawarkan alternatif kemungkinan penyelesaian sengketa untuk menengahi permasalahan yang ada dalam sengketa. Pada intinya, usaha hakim mendamaikan para pihak adalah usaha untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara damai. Dari pemahaman hakim pada umumnya, mereka beranggapan bahwa karakteristik dari perkara perceraian itu menyangkut perasaan. Oleh karena itu mereka tidak mau campur tangan terlalu jauh dalam menangani masalah perceraian yang sedang terjadi.
2. Faktor-faktor penyebab keberhasilan hakim dalam upaya perdamaian, yaitu: kehadiran suami isteri dalam persidangan; problem keluarga yang kemudian diajukan sebagai alasan perceraian, belum berlangsung lama; sikap respek suami isteri dalam mendengarkan nasehat dari hakim untuk rukun kembali. Sedangkan faktor kegagalan hakim dalam upaya

perdamaian, yaitu: hadir tidaknya suami isteri dalam persidangan; kompleksitas alasan perceraian yang diajukan; dan sulitnya suami isteri dinasehati dalam persidangan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya perdamaian dalam perkara perceraian dilakukan secara optimal dan sungguh-sungguh oleh hakim, bukan hanya mengacu pada proses persidangan yang ada akan tetapi lebih dari itu, bahkan jika perlu hakim dapat menjadi mediator di luar persidangan dan dapat meletakkan jabatannya sebagai seorang hakim, akan tetapi lebih memandang sebagai manusia pada umumnya yang cinta akan kebersamaan dan persatuan sesuai dengan ketentuan agama yang sangat tidak menganjurkan adanya perceraian dan permusuhan.
2. Hendaknya arti penting perdamaian tidak hanya dipahami dan dilaksanakan oleh hakim saja tetapi juga oleh kuasa hukum dan pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Ibn Majah, *Sunan Ibni Majah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Aeni, Nurul, "Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Arifin, Bustanul, *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Darajad, Zakiyah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Doi, Abdur Rahman I., *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet. Ke- 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Farida, Asna, "Ceraai Gugat karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Halim, Abdul, "Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Idhami, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, t.t.

Jaziri, Abdur Rahman al-, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad, (dkk), Jakarta: Lentera, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Nur' Muhammad, "Pengabaian Hak Isteri sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Rahmawati, Amalia, "Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, ttp.: Dar al-Fath li 'l'ami al-'Arabi, 1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty: Yogyakarta, 2004.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

D. Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kasnudin, "Kedudukan Akte Perdamaian dalam Putusan PA Yogyakarta tentang Perceraian," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

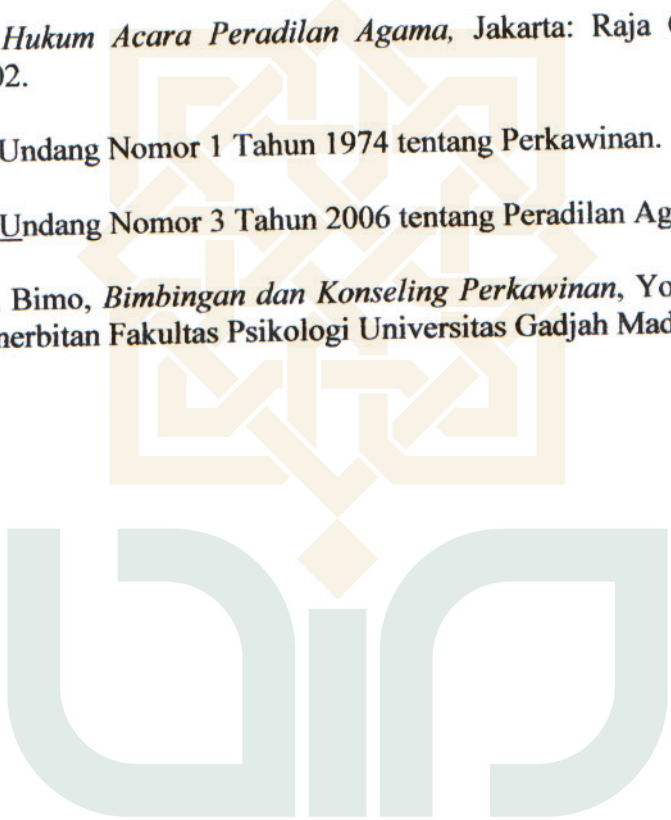
Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002

Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA